

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori Tentang Kurikulum Muatan Lokal Keagamaan

1. Pengertian kurikulum

Sebelum membahas tentang tentang pengertian kurikulum muatan lokal lebih lanjut maka penulis akan memaparkan tentang pengertian kurikulum secara umum terlebih dahulu. Dalam bidang pendidikan, kurikulum merupakan unsur terpenting dalam setiap bentuk dan modal pendidikan. Tanpa adanya kurikulum, sulit rasanya bagi para perencana pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan yang diselenggarakan. Mengingat pentingnya kurikulum maka kurikulum perlu dipahami dengan baik oleh semua pelaksana pendidikan.⁹ Kurikulum berasal dari Bahasa Inggris "*curriculum*" yang artinya: rencana pelajaran.¹⁰ Definisi kurikulum banyak dikemukakan oleh banyak pakar pendidikan dengan pengertian yang beragam. Akan tetapi, secara substansial masing-masing dari pengertian tersebut memiliki substansi yang sama.

Sedangkan pengertian kurikulum secara terminologi banyak dikemukakan oleh tokoh-tokoh pendidikan diantaranya: Definisi kurikulum seperti yang dikatakan Romine yang dikutip Oemar Hamalik, "Curriculum is interpreted to mean all of the organized courses, activities and experiences which pupils have under direction of the school, whether in classroom or

⁹ Suyanto dan Djihad Hisam, *Refleksi dan Reformasi Pendidikan di Indonesia Memasuki Millenium ke III*, (Yogyakarta : Adi Cita Karya Nusa, 2000), 59.

¹⁰ John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996), 160.

not".¹¹ Artinya kurikulum dimaksudkan semua kegiatan dan pengalaman yang terorganisir yang dimiliki peserta didik di bawah bimbingan sekolah baik di dalam kelas maupun di luar kelas.

Banyaknya definisi kurikulum yang satu dengan yang lain saling berbeda dikarenakan dasar filsafat yang dianut oleh penulis berbeda-beda. Walaupun demikian terdapat kesamaan satu fungsi, yaitu bahwa kurikulum adalah alat untuk mencapai tujuan pendidikan.

Kurikulum terdiri atas berbagai komponen yang satu dengan yang lain saling terkait adalah merupakan satu system, yang berarti bahwa setiap komponen yang saling terkait itu mempunyai satu tujuan pendidikan yang juga menjadi tujuan kurikulum. Di dalam UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 19 dijelaskan bahwa: "Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengatuaran mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional".¹²

Pada dasarnya kurikulum berisikan susunan bahan ajar dan pengalaman belajar, tujuan pembelajaran, metode, media dan evaluasi hasil belajar. Kurikulum yang disusun dari pusat berisikan mata pelajaran pokok dengan harapan agar peserta didik di seluruh Indonesia mempunyai standar kecakapan yang sama. Pada zaman dahulu kurikulum pernah diartikan sebagai rencana pelajaran, yang terbagi menjadi rencana pelajaran minimum dan

¹¹ Oemar Hamalik, *Kurikulum dan Pembelajaran*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2001),18.

¹² Departemen Pendidikan Nasional, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003: Sistem Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Depdiknas, 2003)

rencana pelajaran terurai. Dalam kenyataanya di sekolah rencana pelajaran tersebut tidak semata-mata membicarakan proses pengajaran saja, bahkan yang dibahas lebih luas lagi, yaitu mengenai masalah pendidikan.

Akibat dari berbagai perkembangan, terutama perkembangan masyarakat dan kemajuan teknologi, konsep kurikulum juga menerobos pada dimensi waktu dan tempat (lokal). Artinya, kurikulum mengambil bahan ajar dan berbagai pengalaman belajar tidak hanya terbatas pada waktu sekarang, tetapi juga memperhatikan bahan ajar dan berbagai pengalaman pada waktu lampau dan yang akan datang. Demikian pula kurikulum juga mengambil berbagai bahan ajar setempat (lokal) yang kemudian terbentuk kurikulum muatan lokal.

Jadi dari apa yang telah dipaparkan diatas dapat dipahami bahwa kurikulum adalah suatu program pendidikan yang berisikan berbagai bahan ajar dan pengalaman belajar yang diprogramkan, direncanakan dan dirancang secara sistemik atas dasar norma-norma yang berlaku yang dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran bagi tenaga kependidikan dan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan.

2. Pengertian kurikulum muatan lokal

Kurikulum muatan lokal adalah program pendidikan yang isi dan media penyampaiannya dikaitkan dengan lingkungan alam, lingkungan sosial, dan lingkungan budaya serta kebutuhan daerah dan wajib dipelajari oleh murid di daerah itu. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, Kurikulum Muatan lokal merupakan Kurikulum yang berisi mata pelajaran yang

disesuaikan dengan kepentingan daerah.¹³ Pengertian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan muatan lokal kita harus benar-benar memperhatikan karakteristik lingkungan daerah dan juga kebutuhan daerah.¹⁴

Kurikulum muatan lokal juga disebut dengan istilah kurikulum institusional yaitu kurikulum yang dikembangkan oleh masing-masing sekolah sesuai dengan visi, misi dan kebutuhan pemakai jasa pendidikan.¹⁵ Pentingnya pengembangan kurikulum muatan lokal didasarkan pada PP RI No. 19 th. 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 14 ayat 1, bahwa kurikulum untuk SMP/MTs/SMPLB atau bentuk lain yang sederajat dan kurikulum untuk SMA/MA/SMALB atau bentuk lain yang sederajat dapat memasukkan pendidikan berbasis keunggulan lokal.¹⁶ Sehingga dalam hal ini kurikulum muatan lokal sebagai bagian dari kurikulum nasional hanyalah sebagai pengaya kurikulum nasional. Hal ini menunjukkan bahwa masuknya muatan lokal tidak berarti merubah kurikulum yang sudah ada. Artinya, ditinjau dari bidang studi yang telah ada dalam kurikulum nasional tetap digunakan dan dijadikan rujukan dalam menyusun pengajaran muatan lokal.

Dari uraian definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kurikulum muatan lokal adalah suatu program pendidikan yang dikembangkan atau disusun sendiri oleh daerah ataupun suatu lembaga pendidikan yang sesuai

¹³Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 1993), 479.

¹⁴ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 1994), 449.

¹⁵ Arief Furchan, dkk, *Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi di Perguruan Tinggi Agama Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005), 72.

¹⁶ PP RI No. 19 th. 2005 tentang *Standar Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

dengan visi, misi dan kebutuhan pemakai jasa sebagai program unggulan atau ciri khas suatu lembaga pendidikan/madrasah.

Berkenaan dengan aspek keagamaan, kurikulum muatan lokal cenderung memiliki arti sebagai kegiatan pengembangan keagamaan siswa dengan tujuan agar peserta didik memiliki kemampuan keagamaan dan wawasan keislaman serta dapat berperan serta melestarikan tradisi-tradisi keagamaan yang terdapat di lingkungan masyarakat. Demikian juga, kegiatan muatan lokal memiliki tujuan umum yang lain yakni, mendukung keberhasilan kegiatan lainnya salah satunya pembelajaran PAI.

3. Landasan kurikulum muatan lokal

Pada umumnya pengembangan kurikulum muatan lokal tidak jauh beda dengan mata pelajaran lainnya yang pada intinya didasarkan pada prinsip relevansi dengan potensi, kebutuhan, serta kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik.¹⁷

Adapun gagasan muatan lokal pada awalnya merupakan kebijakan baru dalam bidang pendidikan sebagai bentuk aplikasi dari pengembangan kurikulum sekolah. Arti dari kebijakan itu sendiri adalah hasil pemikiran manusia yang harus didasarkan pada hukum-hukum tertentu sebagai landasan. Demikian juga muatan lokal yang dalam pelaksanaannya mempunyai dasar dan landasan yang jelas. Landasaan-landasan tersebut meliputi :

a. Landasan Idiil

¹⁷ Mulyasa, *KTSP: Sebuah Panduan Praktis*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), 273.

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 pasal 37 ayat 1 yang berbunyi:

Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat:

- a) Pendidikan Agama
 - b) Pendidikan Kewarganegaraan
 - c) Bahasa
 - d) Matematika
 - e) Ilmu Pengetahuan Alam
 - f) Ilmu Pengetahuan Sosial
 - g) Seni dan Budaya
 - h) Pendidikan Jasmani dan Olahraga
 - i) Keterampilan atau kejuruan, dan
 - j) Muatan Lokal.¹⁸
- 2) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah menyatakan bahwa Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) selain memuat beberapa mata pelajaran, juga terdapat mata pelajaran Muatan Lokal yang wajib diberikan pada semua tingkat satuan pendidikan.¹⁹

b. Landasan demografik.

Indonesia adalah negara yang terdiri dari beribu-ribu pulau dan memiliki beraneka ragam adat-istiadat, tata cara dan tata krama pergaulan,

¹⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003: Sistem Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Depdiknas, 2003).

¹⁹ Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006, *Tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.*,

seni dan budaya serta kondisi alam dan sosial yang juga beraneka ragam. Hal itu perlu diupayakan kelestariannya agar tidak musnah. Upaya pelestarian tersebut dilakukan dengan cara melaksanakan pendidikan yang bertujuan untuk menjaga kelestarian akan karakteristik daerah sekitar siswa, baik yang berkaitan dengan lingkungan alam, sosial dan budaya peserta didik sedini mungkin.²⁰

Ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan muatan lokal kita harus benar-benar memperhatikan dari karakteristik lingkungan daerah dan juga kebutuhan daerah tersebut.

Adapun lingkungan peserta didik disini terdiri atas:

- 1) Lingkungan alam fisik yang terdiri atas:
 - a) Lingkungan fisik alami, misalnya: daerah rural, urban, semi rural, dan semi urban.
 - b) Lingkungan fisik buatan, misalnya: lingkungan dekat pabrik, pasar, pariwisata, jalan besar, pelabuhan dan sebagainya.
- 2) Lingkungan masyarakat

Dalam lingkungan masyarakat ini menurut A. Sigit terdapat dalam tujuh lapangan hidup, yaitu:

- a) Masyarakat yang hidup dalam bidang ekonomi, misalnya perdagangan, pertanian, kerajinan, peternakan, perikanan, perkebunan, transportasi, jasa, dan sebagainya.

²⁰ Abdullah Idi, *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Gaya Media Pratama, 1999), 177-178.

- b) Masyarakat yang hidup dalam bidang politik, misalnya: sebagai pimpinan anggota partai, pimpinan lembaga baik pemerintah maupun swasta dan sebagainya.
- c) Masyarakat yang hidup dalam bidang ilmu pengetahuan, misalnya: guru, peneliti, ahli-ahli tertentu, pengarang, atau pencipta dan sebagainya.
- d) Masyarakat yang hidup dalam bidang keagamaan (dalam muatan lokal misalnya: berbagai kegiatan perayaan hari besar agama, adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan, dan sebagainya).
- e) Masyarakat yang hidup dalam bidang olah raga, kurikulum dalam muatan lokal misalnya berbagai permainan daerah.²¹

4. Ruang lingkup muatan lokal

Muatan lokal merupakan bagian dari struktur muatan kurikulum yang terdapat pada standar Isi dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan. Keberadaan mata pelajaran muatan lokal merupakan bentuk penyelenggaraan pendidikan yang tidak terpusat, sebagai upaya agar penyelenggaraan pendidikan di masing-masing daerah lebih meningkat relevansinya terhadap keadaan dan kebutuhan daerah yang bersangkutan. Hal ini sejalan dengan upaya peningkatan mutu pendidikan nasional sehingga keberadaan mata pelajaran muatan lokal mendukung dan melengkapi mata pelajaran yang lain.²²

Dalam konteks ini ruang lingkup dan isi mata pelajaran muatan lokal disesuaikan dengan kebutuhan, baik kebutuhan siswa maupun lingkungan sekitar.

²¹ Dakir, *Perencanaan Dan Pengembangan Kurikulum.*, 102.

²² Pusat Kurikulum Depdiknas, http://www.puskur.net/inc/mdl/030_Model_Mulok.pdf, (Jakarta: Balitbang, 2006), hari Kamis tanggal 16 Oktober 2008.

Dengan demikian, perlu adanya identifikasi dan rumusan yang jelas untuk mengetahui kekurangan dan kebutuhan yang dituntut dan selanjutnya dipenuhi melalui kegiatan pengembangan mulok. Secara umum lingkup muatan lokal meliputi :

a. Lingkup keadaan dan kebutuhan daerah

Keadaan daerah adalah segala sesuatu yang terdapat di daerah tertentu yang pada dasarnya berkaitan dengan lingkungan alam, lingkungan sosial ekonomi, lingkungan sosial budaya dan keagamaan. Kebutuhan daerah adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh masyarakat di suatu daerah, khususnya untuk kelangsungan hidup dan peningkatan taraf kehidupan masyarakat tersebut, yang disesuaikan dengan arah perkembangan daerah serta potensi daerah yang bersangkutan.²³ Kebutuhan daerah tersebut misalnya kebutuhan untuk:

- 1) Melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah.
- 2) Meningkatkan kemampuan dan keterampilan di bidang tertentu, sesuai dengan keadaan perekonomian daerah.
- 3) Meningkatkan penguasaan bahasa Asing untuk keperluan sehari-hari, dan menunjang pemberdayaan individu dalam melakukan belajar lebih lanjut (belajar sepanjang hayat).²⁴

b. Lingkup isi atau jenis

Lingkup isi/jenis muatan lokal, dapat berupa: bahasa daerah, bahasa asing (Inggris, Mandarin, Arab dll), kesenian daerah, keterampilan dan

²³ Pusat Kurikulum, Depdiknas, *Model Mata Pelajaran Muatan Lokal SD/MI/SDLB - SMP/MTS/SMPLB - SMA/MA/SMALB/SMK*, (Jakarta: Depdiknas, 2006), 4.

²⁴ Pusat Kurikulum, Depdiknas, *Model Mata Pelajaran Muatan Lokal SD/MI/SDLB - SMP/MTS/SMPLB - SMA/MA/SMALB/SMK*, (Jakarta: Depdiknas, 2006), 4.

kerajinan daerah, adat istiadat, dan pengetahuan tentang berbagai ciri khas lingkungan alam sekitar, serta hal-hal yang dianggap perlu oleh daerah yang bersangkutan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah.²⁵

5. Fungsi dan tujuan kurikulum muatan lokal.

Muatan lokal diberikan dalam rangka usaha pengenalan, pemahaman dan pewarisan nilai karakteristik daerah kepada peserta didik disekolah.²⁶ Hal ini semata-mata untuk menyelaraskan apa yang diberikan kepada siswa dengan kebutuhan dan kondisi yang ada di daerahnya, mengoptimalkan potensi dan sumber belajar yang ada di sekitar bagi kepentingan anak didik, menumbuhkan dan mengembangkan minat perhatian anak didik sesuai dengan kebutuhan yang ada di daerahnya, memperkenalkan dan menanamkan kehidupan sosial budaya, serta nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di masyarakat kepada anak didik.²⁷ Secara ringkas tujuan pengajaran muatan lokal adalah agar siswa :

- 1) Memiliki bakat kemampuan dan keterampilan serta pengetahuan mengenai daerahnya.
- 2) Mengenal lebih dekat dengan lingkungan alam sosial dan budaya.
- 3) Memiliki sikap dan prilaku yang selaras dengan nilai-nilai atau aturan yang berlaku di daerahnya serta dapat melestarikan dan mengembangkannya. Karena itu program muatan lokal yang dikembangkan tidak hanya berbasis kompetensi melainkan juga

²⁵ Pusat Kurikulum, Depdiknas, *Model Pengembangan Mata Pelajaran Muatan Lokal SD/MI/SDLB - SMP/MTS/SMPLB - SMA/MA/SMALB/SMK.*, 4.

²⁶ Subandijah, *Pengembangan dan inovasi kurikulum.*, 148.

²⁷ Nana Sudjana, *Prinsip dan Landasan Pengembangan Kurikulum* (Bandung: Rosdakarya, 1991), 173.

dikembangkan dengan berbasis *life skill*, yaitu kurikulum yang dikembangkan bertolak dari kebutuhan, kemampuan, minat dan bakat dari peserta didik itu sendiri.²⁸

6. Sumber bahan ajar muatan lokal

Dengan adanya kebijaksanaan otonomi daerah, kemungkinan materi muatan lokalnya lebih besar, lebih beragam dan sistemnya tidak terpusat lagi. Dengan kebijaksanaan itu diharapkan daerah dan sekolah dapat menambahkan kurikulum lokal yang sesuai dengan kebutuhan daerah atau sekolah serta masyarakat sekitarnya, sehingga dengan adanya hal itu memungkinkan terjadinya perbedaan muatan kurikulum muatan lokal antara daerah satu dengan daerah yang lainnya.

Muatan lokal bukan suatu mata pelajaran, tetapi lebih merupakan bahan kajian. Artinya, setelah sekolah berkonsultasi dengan instansi induknya, sekolah dapat mengisi muatan lokal dengan beberapa mata pelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.²⁹

Sesuai dengan adanya berbagai sumber bahan ajaran, sumber bahan muatan lokal dapat diklasifikasikan menjadi sebagai berikut:

a. Nara sumber

- 1) Guru itu sendiri yang mungkin mempunyai berbagai pengalaman dan berbagai ketrampilan, misalnya: sebagai ahli tari atau berbagai ketrampilan seperti anyaman, tukang kayu dan sebagainya.

²⁸ Muhaimin, *Arah Baru Pengembangan Pendidikan Islam*, (Jakarta: Nuansa, 2003), 155.

²⁹ Sam M. dan Chan, Tuti T., *Analisis SWOT: Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Pendidikan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 195.

- 2) Peserta didik itu sendiri: yaitu berbagai keahlian dan beberapa keterampilan bawaan dari rumah, misalnya: bertani, beternak, dan sebagainya.
 - 3) Nara sumber yang lain yang ada di sekitar yang mungkin dapat didatangi maupun didatangkan.
- b. Software
- Yaitu suatu sumber bahan yang terdapat pada berbagai tulisan, misalnya buku cara bertanam, beternak, cara membuat kerajinan dan sebagainya. Mungkin juga berupa berbagai film dokumentasi yang sengaja dibuat untuk berbagai sumber bahan muatan lokal.
- c. Hardware
- Yaitu suatu bahan ajaran yang sifatnya dapat diamati dan dapat diraba, misalnya berbagai alat upacara daerah dan berbagai peralatan.
- d. Lingkungan
- Berbagai sumber bahan muatan lokal yang ada di sekitar yang biasanya bersifat historis, misalnya: monumen, adat istiadat, dan sebagainya.
- e. Berbagai hasil diskusi oleh berbagai pakar atau nara sumber yang relevan
- Untuk penentuan bahan selanjutnya perlu adanya pemetaan daerah muatan lokal untuk mengidentifikasi berbagai jenis muatan lokal yang ada. Bahan muatan lokal telah ditetapkan oleh Depdikbud sebesar 20% dari bahan kurikulum keseluruhan.³⁰

³⁰ Dakir, *Perencanaan Dan Pengembangan Kurikulum.*, 104-105.

7. Tahapan pengembangan muatan lokal

Pada dasarnya proses pengembangan muatan keagamaan tidak jauh beda dengan pengembangan muatan secara umum. Oleh karenanya, pengembangan muatan keagamaan juga harus mengacu pada pengembangan muatan yang berdasarkan perseptif KTSP. Dalam pengembangannya mata pelajaran muatan lokal sepenuhnya ditangani oleh pihak sekolah bersama dengan komite sekolah untuk menyusun keputusan mengenai jenis muatan, standar isi, waktu dan kebijakan lainnya. Dengan demikian muatan keagamaan disamping sebagai pendukung pembelajaran PAI juga diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap kebutuhan lingkungan ataupun daerah sekitar dalam rangka mendukung pembangunan daerah maupun pembangunan nasional.

Terdapat beberapa langkah yang harus ditempuh, baik oleh lembaga sekolah maupun oleh guru mata pelajaran sebagai pengelola kegiatan belajar mengajar dilapangan. Adapun tahapan dan langkah-langkah kegiatan yang harus ditempuh oleh sekolah meliputi:

- a. Mengusulkan jenis muatan lokal kepada dinas pendidikan kota atau kabupaten melalui kepala dinas pendidikan kecamatan.
- b. Menentukan mata pelajaran muatan lokal dengan persetujuan dinas pendidikan kecamatan dan kabupaten atau kota.
- c. Bersama-sama dengan dinas kecamatan menentukan mata pelajaran muatan lokal dengan persetujuan kabupaten atau kota.³¹

³¹ Mulyasa, *KTSP: Suatu Panduan Praktis.*, 279.

Relefan dengan penjelasan di atas, pusat kurikulum merinci langkah kegiatan di atas menjadi dua bagian, yakni: langkah kegiatan yang harus ditempuh oleh sekolah dan langkah kegiatan yang harus ditempuh oleh guru. Adapun langkah atau tahapan kegiatan yang harus dilakukan oleh sekolah meliputi :

a. Mengidentifikasi keadaan dan kebutuhan daerah

Kegiatan ini dilakukan untuk menelaah dan meneliti lebih jauh mengenai keadaan dan kebutuhan daerah yang bersangkutan.³² Data tersebut dapat diperoleh melalui pihak-pihak yang terkait yaitu instansi-instansi pemerintah ataupun dari masyarakat itu sendiri, sehingga betul-betul mendapatkan informasi yang jelas dan akurat sesuai dengan keinginan, harapan dan kebutuhan masyarakat.

b. Menentukan fungsi dan susunan atau komposisi muatan lokal

Berdasarkan kajian dari beberapa sumber, maka pengembangan muatan lokal dapat diperoleh yang sekiranya benar-benar dibutuhkan baik bagi anak didik maupun bagi masyarakat sekitar, diantaranya:

- 1) Melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah
- 2) Meningkatkan keterampilan di bidang pekerjaan tertentu
- 3) Meningkatkan kemampuan berwiraswasta
- 4) Meningkatkan penguasaan bahasa Inggris untuk keperluan sehari-hari.³³

³² Pusat Kurikulum, Depdiknas, *Model Mata Pelajaran Muatan Lokal SD/MI/SDLB - SMP/MTS/SMPLB - SMA/MA/SMALB/SMK*, (Jakarta: Depdiknas, 2006), 6.

³³ Pusat Kurikulum, Depdiknas, *Model Mata Pelajaran Muatan Lokal SD/MI/SDLB - SMP/MTS/SMPLB - SMA/MA/SMALB/SMK*, (Jakarta: Depdiknas, 2006), 6.

c. Menentukan bahan kajian muatan lokal.

Kegiatan ini pada dasarnya bertujuan untuk menata dan mengkaji berbagai kemungkinan muatan lokal yang dapat dijadikan sebagai bahan kajian sesuai dengan keadaan dan kebutuhan sekolah. Penentuan bahan kajian muatan lokal didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- 1) Kesesuaian dengan tingkat perkembangan peserta didik.
- 2) Kemampuan guru dan ketersediaan tenaga pendidik yang diperlukan.
- 3) Tersedianya sarana dan prasarana.
- 4) Tidak bertentangan dengan agama dan nilai luhur bangsa.
- 5) Tidak menimbulkan kerawanan sosial dan keamanan.
- 6) Kelayakan berkaitan dengan pelaksanaan di sekolah.
- 7) Lain-lain yang dapat dikembangkan sendiri sesuai dengan kondisi dan situasi daerah.³⁴

d. Menentukan mata pelajaran muatan lokal

Berdasarkan bahan kajian muatan lokal tersebut dapat ditentukan kegiatan pembelajarannya. Kegiatan pembelajaran ini pada dasarnya dirancang agar bahan kajian muatan lokal dapat memberikan bekal pengetahuan, keterampilan dan perilaku kepada peserta didik agar mereka memiliki wawasan yang mantap tentang keadaan lingkungan dan kebutuhan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai atau aturan yang berlaku di daerahnya dan mendukung kelangsungan pembangunan daerah serta pembangunan nasional. Kegiatan ini berupa kegiatan kurikuler untuk

³⁴ Pusat Kurikulum, Depdiknas, *Model Mata Pelajaran Muatan Lokal SD/MI/SDLB - SMP/MTS/SMPLB - SMA/MA/SMALB/SMK*, (Jakarta: Depdiknas, 2006), 6-7.

mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas, potensi daerah, dan prospek pengembangan daerah termasuk keunggulan daerah, yang materinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada. Serangkaian kegiatan pembelajaran yang sudah ditentukan oleh sekolah dan komite sekolah kemudian ditetapkan oleh sekolah dan komite sekolah untuk dijadikan nama mata pelajaran muatan lokal. Substansi muatan lokal ditentukan oleh satuan pendidikan.³⁵

Sedangkan langkah kegiatan yang harus ditempuh oleh guru, yakni:

a. Pengembangan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar.

Pengembangan SK dan KD merupakan kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa. dalam prosesnya penentuan dua aspek ini dilakukan dengan melibatkan guru, ahli bidang kajian, seksi kurikulum agar formasi mata pelajaran mulok yang dilaksanakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan, tuntutan dan potensi peserta didik yang ingin dikembangkan.

b. Pengembangan silabus.

Dalam implementasinya, silabus dijabarkan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran, dilaksanakan, dievaluasi, dan ditindak lanjuti oleh masing-masing guru. Silabus harus dikaji dan dikembangkan secara berkelanjutan dengan memperhatikan masukan hasil evaluasi hasil belajar, evaluasi proses (pelaksanaan pembelajaran), dan evaluasi rencana pembelajaran. Pengembangan silabus secara umum mencakup:

1) Mengidentifikasi materi pembelajaran

³⁵ Pusat Kurikulum, Depdiknas, *Model Mata Pelajaran Muatan Lokal SD/MI/SDLB - SMP/MTS/SMPLB - SMA/MA/SMALB/SMK*, (Jakarta: Depdiknas, 2006), 7.

- 2) Mengembangkan kegiatan pembelajaran
 - 3) Mengembangkan indikator
 - 4) Pengembangan penilaian
 - 5) Pengalokasian waktu
 - 6) Menentukan sumber belajar³⁶
- c. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).

Setelah silabus selesai dibuat, maka guru perlu merencanakan pelaksanaan pembelajaran untuk tiap satuan pembelajaran atau satuan kegiatan. Adapun komponen RPP minimal memuat :

- 1) Tujuan pembelajaran
 - 2) Indikator
 - 3) Materi ajar atau pembelajaran
 - 4) Kegiatan pembelajaran
 - 5) Metode pengajaran
 - 6) Sumber belajar.³⁷
- d. Penilaian.

Penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan. Penilaian pencapaian kompetensi dasar peserta didik dilakukan berdasarkan indikator. Penilaian dilakukan dengan menggunakan tes dan non tes dalam

³⁶ Pusat Kurikulum, Depdiknas, *Model Mata Pelajaran Muatan Lokal SD/MI/SDLB - SMP/MTS/SMPLB - SMA/MA/SMALB/SMK*, (Jakarta: Depdiknas, 2006), 7.

³⁷ Muslim, *Pengembangan Kurikulum PAI Teoritis dan Praktis*, (Semarang : PKPI2, 2008), 130.

bentuk tertulis maupun lisan, pengamatan kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek dan atau produk, penggunaan portofolio, dan penilaian diri.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penilaian:

- 1) Penilaian diarahkan untuk mengukur pencapaian kompetensi.
- 2) Penilaian menggunakan acuan kriteria, yaitu berdasarkan apa yang bisa dilakukan peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran, dan bukan untuk menentukan posisi seseorang terhadap kelompoknya.
- 3) Sistem yang direncanakan adalah sistem penilaian yang berkelanjutan. Berkelanjutan dalam arti semua indikator ditagih, kemudian hasilnya dianalisis untuk menentukan kompetensi dasar yang telah dimiliki dan yang belum, serta untuk mengetahui kesulitan siswa.
- 4) Hasil penilaian dianalisis untuk menentukan tindak lanjut. Tindak lanjut berupa perbaikan proses pembelajaran berikutnya, program remedi bagi peserta didik yang pencapaian kompetensinya di bawah kriteria ketuntasan, dan program pengayaan bagi peserta didik yang telah memenuhi kriteria ketuntasan.
- 5) Sistem penilaian harus disesuaikan dengan pengalaman belajar yang ditempuh dalam proses pembelajaran. Misalnya, jika pembelajaran menggunakan pendekatan tugas observasi lapangan maka evaluasi harus diberikan baik pada proses (keterampilan proses) misalnya teknik

wawancara, maupun produk atau hasil melakukan observasi lapangan yang berupa informasi yang dibutuhkan.³⁸

B. Implementasi Kurikulum Muatan Lokal Keagamaan

Implementasi menurut Tim Penyusun Kamus PPPB mempunyai arti pelaksanaan atau penerapan.³⁹ Implementasi pada pengertian lain berarti suatu penerapan ide, konsep, kebijakan atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, ketrampilan maupun nilai dan sikap.⁴⁰

Mengacu pada pengertian implementasi kurikulum di atas, maka implementasi kurikulum muatan lokal keagamaan berarti suatu proses penerapan ide, konsep, dan kebijakan kurikulum muatan lokal keagamaan dalam suatu aktivitas pembelajaran, sehingga akan terjadi perubahan-perubahan atau peningkatan pada peserta didik sesuai dengan tujuan yang dikehendaki, yaitu yang berkenaan dengan aspek keagamaan sebagai hasil proses interaksi antara fasilitator sebagai pengembang kurikulum dan peserta didik sebagai subjek belajar.

Implementasi Kurikulum muatan lokal keagamaan yang dilakukan di madrasah, menurut Oemar Hamalik mencakup tiga kegiatan pokok yang didasarkan pada tahap-tahap implementasi kurikulum, yaitu Perencanaan/pengembangan program, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi.⁴¹

1. Perencanaan kurikulum

³⁸ Pusat Kurikulum Depdiknas, http://www.puskur.net/inc/mdl/030_Model_Mulok.pdf, (Jakarta: Balitbang, 2006), hari Kamis tanggal 16 Oktober 2008.

³⁹ Tim Penyusun Kamus PPPB Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka. Tim Penyusun Kamus PPPB, 1996), 374.

⁴⁰ Mulyasa, *Kurikulum Berbasis Kompetensi; Konsep, Karakteristik dan Implementasi*, (Bandung: P.T. Remaja Rosdakarya, 2003), 43.

⁴¹ Hamalik, *Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum* ., 238.

Suatu proses ketika peserta dalam banyak tingkatan membuat keputusan tentang tujuan belajar, cara mencapai tujuan tersebut melalui situasi mengajar-belajar, serta penelaahan keefektifan dan kebermaknaan metode tersebut. Tanpa perencanaan kurikulum, sistematika berbagai pengalaman belajar tidak akan saling berhubungan dan tidak mengarah kepada tujuan yang diharapkan.⁴²

Adapun prosedur atau langkah-langkah perencanaan kurikulum muatan lokal keagamaan yang dapat dilakukan di madrasah menurut Zainal Arifin adalah

sebagai berikut :

- a. Pertama, yang harus dilakukan oleh madrasah adalah mengidentifikasi siapa saja yang terlibat dalam perencanaan kurikulum muatan lokal. Pihak yang terlibat adalah Kepala Madrasah, Tim Pengembang Kurikulum Madrasah (TPKM), guru (PAI), komite madrasah, dan pihak-pihak terkait lainnya, seperti Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), Perguruan Tinggi Islam, Tokoh Masyarakat dan dinas terkait.
- b. Selanjutnya, Kepala Madrasah menugaskan TPKM untuk menyusun rencana kegiatan dan rambu-rambu pengembangan kurikulum muatan lokal.
- c. Kepala Madrasah memberi arahan teknis tentang pengembangan Muatan lokal yang sekurang-kurangnya memuat dasar pelaksanaan pengembangan Muatan lokal, tujuan dan manfaat pengembangan Muatan lokal, hasil yang

⁴² Ibid.,

- diharapkan dari pengembangan Muatan lokal, dan unsure-unsur yang terlibat dan uraian tugasnya dalam pengembangan kurikulum Muatan lokal.
- d. TPK Madrasah menyusun rencana dan jadwal kegiatan pengembangan Muatan local keagamaan.
 - e. TPK madrasah menyusun rambu-rambu dan perangkat pendukung pengembangan Muatan lokal keagamaan, yang meliputi pengumpulan data potensi dan kebutuhan lingkungan/daerah, data potensi satuan pendidikan, dan daya dukung internal (kepala madrasah, guru PAI, petugas administrasi, dan peserta didik) dan eksternal (dukungan masyarakat dan lingkungan di sekitar satuan pendidikan, antara lain komite madrasah, dewan pendidikan, tokoh masyarakat dan dinas yang terkait dengan pengembangan dan pelaksanaan muatan lokal). Data ini digunakan untuk penyusunan analisis potensi dan kebutuhan daerah; penyusunan analisis potensi satuan pendidikan, termasuk identifikasi minat dan bakat peserta didik; penentuan jenis muatan lokal yang akan di laksanakan di madrasah; kerja sama dengan instansi terkait; penyusunan SK, KD dan SKL muatan lokal; pengesahan dokumen muatan lokal.
 - f. Kepala madrasah bersama TPK madrasah membahas rencana dan jadwal kegiatan, rambu-rambu dan perangkat pendukung pengembangan muatan local. Selanjutnya kepala madrasah mengesahkan rencana dan jadwal kegiatan, rambu-rambu dan perangkat pendukung tersebut.

- g. TPK madrasah mengumpulkan data dan melakukan analisis tentang: potensi dan kebutuhan daerah, bakat dan minat peserta didik, dan analisis potensi dan daya dukung satuan pendidikan internal dan eksternal.
- h. Kepala madrasah bersama TPK madrasah mengidentifikasi jenis-jenis mata pelajaran yang akan dikembangkan pada muatan lokal yang dapat dilaksanakan di madrasah berdasarkan hasil analisis.
- i. Kepala madrasah memberi tugas kepada guru yang akan mengajar muatan lokal keagamaan. Penugasan mempertimbangkan kualifikasi dan kompetensi guru yang bersangkutan.
- j. Kepala madrasah membuat kesepakatan kerja sama (memorandum of understanding) dengan pihak-pihak terkait dengan jenis muatan lokal yang akan dilaksanakan.
- k. TPK madrasah bersama guru muatan lokal keagamaan (PAI) dan pihak terkait mengembangkan SKL, SK, dan KD muatan lokal.
- l. Kepala madrasah mengesahkan dokumen muatan lokal keagamaan yang akan dilaksanakan di madrasah lengkap dengan SKL, SK, dan KD.
- m. TPK madrasah menggandakan dokumen muatan lokal keagamaan dan mendistribusikan kepada guru muatan lokal dan pihak lain yang memerlukan.⁴³

Dalam menyusun perencanaan muatan lokal harus memperhatikan berbagai unsur atau komponen yang saling terkait juga yang berkaitan dengan

⁴³ Zainal Arifin, *Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum*, (Bandung: Rosdakarya, 2011). 226-228.

berbagai sumber, seperti pengajar, metode, media, dana, dan evaluasinya.⁴⁴

Menurut Dakir, merencanakan bahan muatan lokal yang akan diajarkan, langkah-langkahnya dapat ditempuh sebagai berikut :

- a. Mengidentifikasi segala sesuatu yang mungkin dapat dijadikan bahan muatan lokal.
 - b. Menyeleksi bahan muatan lokal dengan criteria sebagai berikut:
 - 1) Sesuai dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan peserta didik.
 - 2) Tidak bertentangan dengan Pancasila dan berbagai peraturan adat yang berlaku.
 - 3) Letaknya terjangkau dari sekolah/madrasah.
 - 4) Ada narasumber baik di dalam maupun di luar sekolah/madrasah.
 - 5) Bahan/kegiatan tersebut merupakan sesuai dengan karakteristik dan potensi di daerah dimana satuan pendidikan berada.
 - c. Menyusun garis-garis besar program pembelajaran (GBPP) yang bersangkutan.
 - d. Mencari sumber bahan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.
 - e. Mengusahakan sarana/prasarana yang relevan dan terjangkau.⁴⁵
2. Pelaksanaan kurikulum Muatan Lokal keagamaan.

Implementasi kurikulum juga dapat diartikan sebagai aktualisasi kurikulum tertulis (written curriculum) dalam bentuk pembelajaran. Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Miller dan Seller, bahwa "in some

⁴⁴ Dakir, *Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010). 119.

⁴⁵ Ibid., 120.

case, implementation has been indentified with instruction".⁴⁶ Lebih lanjut dijelaskan bahwa implementasi kurikulum merupakan suatu penerapan konsep, ide, program, atau tatanan kurikulum ke dalam praktik pembelajaran atau berbagai aktivitas baru, sehingga terjadi perubahan pada sekelompok orang yang diharapkan untuk berubah.⁴⁷

Dengan demikian, implementasi kurikulum adalah penerapan atau pelaksanaan program kurikulum yang telah dikembangkan dalam tahap sebelumnya, kemudian diujicobakan dengan pelaksanaan dan pengelolaan, sambil senantiasa dilakukan penyesuaian terhadap situasi lapangan dan karakteristik peserta didik, baik perkembangan intelektual, emosional, serta fisiknya.

3. Evaluasi kurikulum muatan lokal keagamaan.

evaluasi adalah alat untuk mengukur ketercapaian tujuan. Dengan evaluasi, dapat diukur kuantitas dan kualitas pencapaian tujuan pembelajaran. Pada hakekatnya evaluasi merupakan suatu kegiatan untuk mengukur perubahan perilaku yang telah terjadi. Istilah evaluasi atau penilaian mempunyai bermacam-macam konotasi. Sebagian orang beranggapan bahwa penilaian sama dengan tes atau pemberian nilai (grading). Pemberian nilai memang sebagian dari kegiatan penilaian, tetapi penilaian lebih dari sekedar pemberian nilai. Penilaian dapat diartikan sebagai "pemberian nilai (valuing) atau pertimbangan", yang dalam dunia pendidikan dapat berarti mempertimbangkan murid, guru, kegiatan belajar mengajar, dan kurikulum.

⁴⁶ J.P. Miller dan W. Seller, *Curriculum: Perspective and Practice*, (New York dan London: Longman, 1985). 81.

⁴⁷ Ibid.,

Dari sini kemudian dapat kita mengerti bahwa penilaian merupakan suatu proses, yaitu proses pembuatan pertimbangan terhadap suatu hal.⁴⁸

Dengan demikian, pengertian evaluasi kurikulum dapat disimpulkan dengan suatu tindakan pengendalian, penjaminan dan penetapan mutu kurikulum, berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu, sebagai bentuk akuntabilitas pengembang kurikulum dalam rangka menentukan keefektifan kurikulum.⁴⁹

Tujuan evaluasi kurikulum adalah untuk mengetahui keefektifan dan efisiensi system kurikulum baik yang menyangkut tentang tujuan, isi/materi, strategi media, sumber belajar, lingkungan maupun sistem penilaian itu sendiri.⁵⁰

Menurut Scriven dalam Zainal Arifin,⁵¹ fungsi evaluasi dapat dilihat dari jenis evaluasi itu sendiri yang dibedakan menjadi :

a. Evaluasi Formatif

Evaluasi formatif adalah proses ketika pengembang kurikulum memperoleh data untuk memperbaiki dan merevisi kurikulum agar menjadi lebih efektif. Evaluasi dituntut dilaksanakan sejak awal dan sepanjang proses pengembangan kurikulum.⁵² Evaluasi formatif berfungsi

⁴⁸ Burhan Nurgiyantoro, *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum Sekolah* (Yogyakarta: BPFE, 2008), 187.

⁴⁹ Arifin, *Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum.*, 263.

⁵⁰ Ibid., 268.

⁵¹ Ibid.,

⁵² Hamalik, *Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum.*, 262.

untuk perbaikan dan pengembangan bagian tertentu atau sebagian besar bagian kurikulum yang sedang dikembangkan.⁵³

b. Evaluasi Sumatif

Adapun evaluasi sumatif bertujuan untuk memeriksa kurikulum, dan diadakan setelah pelaksanaan kurikulum untuk memeriksa efisiensi secara keseluruhan. Evaluasi sumatif menggunakan teknik secara numerik, dan menghasilkan kesimpulan berupa data yang diperlukan guru dan administrasi pendidikan.⁵⁴ Sedangkan fungsi sumatif dihubungkan dengan penyimpulan mengenai kebaikan dari system secara keseluruhan. Fungsi ini baru dapat dilaksanakan apabila pengembangan suatu kurikulum telah dianggap selesai.⁵⁵

C. Kajian Tentang Mutu Pendidikan Agama Islam

1. Pengertian Mutu dalam Pendidikan.

Definisi Mutu Dalam Kamus Indonesia-Inggris memiliki arti sepadan dalam bahasa Inggris *quality* yang artinya taraf atau tingkatan kebaikan; nilai suatu. Secara umum kualitas atau mutu adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan atau tersirat.⁵⁶

Pengertian mutu sebenarnya berasal dari dunia bisnis. Dalam dunia bisnis, baik yang bersifat produksi maupun jasa, mutu merupakan program

⁵³ Arifin, *Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum.*, 268.

⁵⁴ Hamalik, *Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum.*, 262.

⁵⁵ Arifin, *Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum.*, 268-269.

⁵⁶ Umiarso dan Imam Gojali, *Manajemen Mutu Sekolah di Era Otonomi Pendidikan; 'menjual' mutu pendidikan dengan pendekatan quality control bagi pelaku lembaga pendidikan*, (Yogyakarta: Ircisod, 2011), 99.

utama sebab kelanggengan dan kemajuan usaha sangat ditentukan oleh mutu sesuai dengan permintaan dan tuntutan pengguna (konsumen). Permintaan dan tuntutan pengguna terhadap produk dan jasa layanan terus berubah dan berkembang. Sejalan dengan hal itu, mutu produk dan jasa layanan yang diberikan harus selalu ditingkatkan. Dewasa ini, mutu bukan hanya menjadi masalah dan kepedulian dalam bidang bisnis, melainkan juga dalam bidang-bidang lainnya, seperti permintaan, layanan sosial, pendidikan, bahkan bidang keamanan dan ketertiban sekalipun.⁵⁷

Secara umum mutu adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan. Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu mencakup input, proses dan output pendidikan.⁵⁸

Input pendidikan adalah segala sesuatu yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses. Sesuatu yang dimaksud berupa sumberdaya dan perangkat lunak serta harapan-harapan sebagai pemandu bagi berlangsungnya proses. Input sumberdaya meliputi sumberdaya meliputi kepala sekolah, guru, karyawan, siswa, peralatan, perlengkapan, uang, bahan dan lain sebagainya. Input perangkat lunak meliputi struktur organisasi sekolah, peraturan perundang-undangan, deskripsi tugas, rencana, program dan lain sebagainya. Input harapan-harapan berupa visi, misi, tujuan, dan sasaran-sasaran yang ingin dicapai oleh sekolah. Kesiapan input sangat

⁵⁷ Nana Syaodih Sukmadinata. Dkk, *Pengendalian Mutu Pendidikan Sekolah menengah: Konsep, Prinsip, dan Instrumen* (Bandung: Refika Aditama, 2006), 8.

⁵⁸ Artikel Pendidikan, *Konsep Dasar MPMBS*, <http://www.dikdasmen.depdiknas.go.id>, 3. diakses pada tanggal 25 Agustus 2013.

diperlukan agar proses dapat berlangsung dengan baik. Oleh karena itu, tinggi rendahnya mutu input dapat diukur dari tingkat kesiapan input. Makin tinggi kesiapan input, makin tinggi pula mutu input tersebut.⁵⁹

Proses pendidikan merupakan berubahnya sebuah sesuatu menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang berpengaruh terhadap berlangsungnya proses disebut input, sedang sesuatu dari hasil proses disebut output. Dalam pendidikan bersekala mikro (tingkat sekolah), proses yang dimaksud adalah proses pengambilan keputusan, proses pengelolaan kelembagaan, proses pengelolaan program, proses belajar mengajar, dan proses monitoring dan evaluasi, dengan catatan bahwa proses belajar mengajar memiliki tingkat kepentingan tertinggi dibandingkan dengan proses-proses lainnya.⁶⁰

Proses dikatakan bermutu apabila pengkordinasian dan penyerasian serta pemaduan input sekolah (guru, siswa, kurikulum, uang, peralatan, dsb) dilakukan secara harmonis, sehingga mampu menciptakan situasi pembelajaran yang menyenangkan (*enjoyable learning*), mampu mendorong motivasi dan minat belajar, dan benar-benar mampu memberdayakan peserta didik. Kata memberdayakan mengandung arti bahwa peserta didik tidak sekedar menguasai pengetahuan yang diajarkan oleh gurunya, akan tetapi pengetahuan tersebut juga telah menjadi muatan nurani peserta didik, dihayati, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan yang lebih penting lagi peserta

⁵⁹ *Ibid.*, 3.

⁶⁰ *Ibid.*, 3

didik tersebut mampu belajar secara terus menerus (mampu mengembangkan dirinya).⁶¹

Output pendidikan adalah merupakan kinerja sekolah. Kinerja sekolah adalah prestasi sekolah yang dihasilkan dari proses/prilaku sekolah. Kinerja sekolah dapat diukur dari kualitasnya, efektifitasnya, produktivitasnya, efisiensinya, inovasinya, kualitas kehidupan kerjanya, dan moral kerjanya. Khusus yang berkaitan dengan mutu output sekolah, dapat dijelaskan bahwa output sekolah dikatakan berkualitas/bermutu tinggi jika prestasi sekolah, khususnya prestasi belajar siswa, menunjukkan pencapaian yang tinggi dalam: (1) prestasi akademik, berupa nilai ulangan umum, EBTA, EBTANAS, karya ilmiah, lomba akademik; dan (2) prestasi non-akademik, seperti misalnya IMTAQ, kejujuran, kesopanan, dan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler lainnya. Mutu sekolah dipengaruhi oleh banyak tahapan kegiatan yang saling berhubungan (proses) seperti misalnya perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.⁶²

2. Ciri - Ciri Mutu Pendidikan

Era globalisasi merupakan era persaingan mutu. Oleh karena itu lembaga pendidikan mulai dari tingkat tinggi harus memperhatikan mutu pendidikan. Lembaga pendidikan berperan dalam kegiatan jasa pendidikan maupun pengembangan sumber daya manusia harus memiliki keunggulan-keunggulan yang diprioritaskan dalam lembaga pendidikan tersebut.

⁶¹ *Ibid*, 4

⁶² *Ibid*, 4.

Transformasi menuju sekolah bermutu diawali dengan mengadopsi dedikasi bersama terhadap mutu oleh dewan sekolah, administrator, staff, siswa, guru dan komunitas. Proses diawali dengan mengembangkan visi dan misi mutu untuk wilayah dan setiap sekolah serta departemen dalam wilayah tersebut.⁶³

Visi mutu difokuskan pada lima hal, yaitu:

a. Pemenuhan kebutuhan konstumer

Dalam sebuah sekolah yang bermutu, setiap orang menjadi kostumer dan sebagai pemasok sekaligus. Secara khusus kostumer sekolah adalah siswa dan keluarganya, merekalah yang akan memetik manfaat dari hasil proses sebuah lembaga pendidikan (sekolah). Sedangkan dalam kajian umum kostumer sekolah itu ada dua, yaitu internal meliputi orang tua, siswa, guru, administrator, staff dan dewan sekolah yang berada dalam sistem pendidikan. Dan kostumer eksternal yaitu, masyarakat, perusahaan, keluarga, militer, dan perguruan tinggi yang berada diluar organisasi namun memanfaatkan output dari proses pendidikan.

b. Keterlibatan total komunitas dalam program

Setiap orang juga harus terlibat dan berpartisipasi dalam rangka menuju kearah transformasi mutu. Mutu bukan hanya tanggung jawab semua pihak.

c. Pengukuran nilai tambah pendidikan

⁶³ Jerome S. Arcaro, *Pendidikan Berbasis Mutu, Prinsip-prinsip dan Tata langkah penerapan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 10.

Pengukuran ini justru yang seringkali gagal dilakukan di sekolah. Secara tradisional ukuran mutu atas keluarga sekolah adalah prestasi siswa, dan ukuran dasarnya adalah ujian. Bilamana hasil ujian bertambah baik, maka mutu pendidikan pun membaik.

d. Memandang pendidikan sebagai suatu sistem

Pendidikan mesti dipandang sebagai suatu sistem, ini merupakan konsep yang amat sulit dipahami oleh para profesional pendidikan. Umpamanya orang bekerja dalam bidang pendidikan memulai perbaikan sistem tanpa mengembangkan pemahaman yang penuh atas cara sistem tersebut bekerja. Hanya dengan memandang pendidikan sebagai sebuah sistem maka para profesor pendidikan dapat mengeliminasi pemborosan dari pendidikan dan dapat memperbaiki mutu setiap proses pendidikan.

e. Perbaikan berkelanjutan dengan selalu berupaya keras membuat output pendidikan menjadi lebih baik.

Mutu adalah segala sesuatu yang dapat diperbaiki menurut filosofi manajemen lama "kalau belum rusak jangan diperbaiki". Mutu didasarkan pada konsep bahwa setiap proses dapat diperbaiki dan tidak ada proses yang sempurna. Menurut filosofi manajemen yang baru "bila tidak rusak perbaikilah, karena bila tidak dilakukan anda maka orang lain yang akan melakukan". Inilah konsep perbaikan berkelanjutan.⁶⁴

3. Pendidikan Agama Islam

⁶⁴ *Ibid*, 11-14

Dalam GBPP PAI dijelaskan bahwa pendidikan Agama Islam adalah usaha sadar untuk menyiapkan siswa dalam meyakini, memahami menghayati dan mengamalkan agama islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan atau dengan latihan dengan memperhatikan tuntunan untuk menghormati agama lain dalam hubungan kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat untuk mewujudkan persatuan nasional.⁶⁵ Menurut A.Tafsir Pendidikan Agama Islam adalah bimbingan yang diberikan seseorang kepada seseorang agar ia berkembang secara maksimal sesuai dengan ajaran islam.⁶⁶

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan Agama Islam adalah usaha sadar yang dilakukan pendidik dalam rangka mempersiapkan peserta didik agar meyakini, memahami, dan mengamalkan ajaran islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan pelatihan yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

4. Mutu Pendidikan Agama Islam

Berdasarkan paparan data dari makna mutu diatas, maka mutu pendidikan Agama Islam adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh jasa pelayanan pendidikan secara internal maupun eksternal yang menunjukkan kemampuannya memuaskan kebutuhan yang diharapkan atau yang tersirat mencakup input, proses, dan output pendidikan. Dalam konteks mutu pendidikan, pada hakekatnya tujuan lembaga pendidikan adalah untuk menciptakan dan mempertahankan kepuasan para pelanggan dan dalam

⁶⁵ Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Islam. Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam Di Sekolah*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2001), 7.

⁶⁶ Abdul Majid, dkk., *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi Konsep dan Implementasi Kurikulum 2004*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004), 130.

kepuasan pelanggan ditentukan oleh stakeholder (konsumen) lembaga pendidikan tersebut. Oleh karena itu hanya dengan memahami proses dan kepuasan pelanggan maka lembaga dapat menyadari dan menghargai kualitas. Semua usaha atau kegiatan manajemen mutu harus diarahkan pada suatu tujuan utama, yaitu kepuasan pelanggan, apa yang dilakukan manajemen tidak ada gunanya bila tidak melahirkan kepuasan pelanggan.⁶⁷

5. Faktor yang mempengaruhi mutu Pendidikan Agama Islam

Dalam pelaksanaan pendidikan di suatu lembaga pendidikan tidak terlepas dari lima faktor pendidikan agar kegiatan pendidikan terlaksana dengan baik. Apabila salah satu faktor tidak ada maka mutu pendidikan tidak dapat tercapai dengan baik karena faktor yang satu dengan yang lainnya saling melengkapi dan saling berhubungan.⁶⁸ Adapun kelima faktor tersebut adalah:

a. Faktor Tujuan

Untuk meningkatkan mutu pendidikan, maka faktor tujuan perlu diperhatikan. Sebab mutu suatu lembaga pendidikan yang berjalan tanpa berpegang pada tujuan akan sulit mencapai apa yang diharapkan. Untuk meningkatkan mutu pendidikan, sekolah senantiasa harus berpegang pada tujuan sehingga mampu menghasilkan output yang berkualitas.

Dengan adanya perencanaan seperti itu dapat disimpulkan bahwa faktor utama yang harus dijadikan pedoman dalam melaksanakan

⁶⁷ Tampubolon, Daulat P, *Perguruan Tinggi Bermutu: Paradigma Baru Manajemen Pendidikan Tinggi Menghadapi Tantangan Abad Ke-21*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), 120.

⁶⁸ Zahara Idris dan Lisma Jamal, *Pengantar Pendidikan*, (Jakarta: PT Gramedia Widiarana Indonesia, 1992), 28.

pendidikan nasional, intruksional maupun tujuan yang lain yang sebih sempit.

b. Faktor Guru (pendidik)

Guru adalah orang yang sangat berpengaruh dalam proses belajar mengajar. Oleh karena itu, guru harus benar-benar membawa siswanya kepada tujuan yang ingin dicapai. Guru harus mampu mempengaruhi siswanya. Guru harus berpandangan luas dan kriteria bagi seorang guru ialah harus memiliki kewibawaan.

Guru merupakan salah satu faktor penentu dalam upaya peningkatan mutu pendidikan, karena gurulah yang merupakan aktor utama dalam melaksanakan kegiatan pendidikan.

c. Faktor Siswa

Anak didik atau siswa merupakan objek dari pendidikan, sehingga mutu pendidikan yang akan dicapai tidak akan lepas dengan ketergantungan terhadap kondisi fisik tingkah laku dan minat bakat dari anak didik.

d. Faktor Alat

Yang dimaksud faktor alat (alat pendidikan), adalah segala usaha atau tindakan dengan sengaja yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Alat pendidikan ini merupakan masalah yang esensial dalam pendidikan, karena itu perlu dilakukan upaya untuk menyediakan alat-alat tersebut. Yang dikategorikan sebagai alat pendidikan adalah sesuatu yang

dapat memenuhi tercapainya tujuan pendidikan yaitu sarana, prasarana dan kurikulum.

e. Faktor Lingkungan/ Masyarakat

Kemajuan pendidikan sedikit banyak dipengaruhi oleh masyarakat termasuk orang tua siswa, karena tanpa adanya bantuan dan kesadaran dari masyarakat sulit untuk melaksanakan peningkatan mutu pendidikan. Sekolah dan masyarakat merupakan dua kelompok yang tidak dapat dipisahkan dan saling melengkapi satu sama lainnya. Karena itulah dibentuklah komite sekolah berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan No 044/V/2002 tentang pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, maka otonomi sekolah bermitra kerja dengan Komite Sekolah. Peran Komite Sekolah memberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijaksanaan pendidikan, mendukung penyelenggaraan pendidikan, mengontrol, mediator antara pemerintah dan masyarakat.